

**KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
(LPMK) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN  
PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK**

**Oleh:  
NABILA NURUL ANNISYA  
NIM. E42010035**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  
E-mail : nabilanurulannisya@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Lokasi penelitian ialah Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Subjek Penelitian ialah Lurah Bangka Belitung Laut, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketua LPMK, Sekretaris LPMK, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dari segi Responsivitas yang kurang aktif pada Musrenbang, kurang tepat mengatasi keluhan dan pasif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Pada tanggung jawab masih kurang sesuai dengan Peraturan daerah kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengenai keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB. Kemudian dilihat dari Akuntabilitas pada perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan di tingkat kelurahan masih minim, LPMK kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK terhadap kelurahan.

Kata-kata Kunci : Kinerja, LPMK, Responsivitas, Tanggung Jawab, Akuntabilitas

## Abstract

This study aimed to describe the performance of the Village Community Development Institute (LPMK) in the Village of Sea Pacific Islands. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation and document study. Data analysis techniques used namely data reduction, data presentation and verification. The research location is the Pacific Islands Marine Village East District of the city of Pontianak Pontianak. The research subject is the Pacific Islands Marine Village Head, Village Chief Secretary, Community Development Section Head, LPMK Chairman, Secretary LPMK, RW Chairman, Chairman of RT and society. The results showed that the performance of LPMK in the Pacific Islands Marine Village East District of the city of Pontianak Pontianak in terms of responsiveness that are less active on Musrenbang, less precise address complaints and passive in the community aspirations. In still less responsibility in accordance with Regulation No. 24 of Pontianak city area of 2002 on Guidelines for the Establishment of Community Empowerment LPMK involvement in UN voting. Then views of Accountability in the planning and implementation Musrenbang conducted at village level is still low, less LPMK promote the aspirations of the people, and the lack of documentation as a result of the form of reports and accountability activities undertaken by LPMK the village.

Keywords: Performance, LPMK, Responsiveness, Responsibility, Accountability



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Kelurahan merupakan unit dari pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan, menjelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pontianak. Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3 Pasal 9, yang menguraikan tentang kedudukan, tugas dan fungsi lurah pada Peraturan Daerah tersebut, maka diamanatkan mengenai fungsi yang harus dilaksanakan lurah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan serta memaksimalkan fungsi yang diamanatkan, maka pemerintah kelurahan membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Terbentuknya LPMK ini telah ditetapkan pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ditetapkannya peraturan daerah tersebut, diharapkan LPMK dapat menjadi mitra dari pemerintah kelurahan. Pembentukan LPMK adalah sebagai media partisipasi masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip partisipasi, yang merupakan satu di antara

prinsip yang harus dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dijelaskan di dalam Peraturan Daerah sebelumnya, bahwa dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini memiliki tujuan untuk membantu pemerintah di dalam meningkatkan pelayanan pemerintah, dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan program kerja yang ada di Kelurahan yaitu Pemberdayaan Kelurahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kreativitas, responsibilitas dan produktivitas di dalam memanfaatkan serta menghadapi dan mengatasi segala tantangan hambatan dan peluang globalisasi. Sebagaimana tertulis di dalam Bab 2 Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002.

Setelah mengetahui dampak yang diberikan, maka disetiap kelurahan perlu dibentuk LPMK demi menunjang pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kota, dimana kelurahan akan terlibat langsung di dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dan pelayanan. Oleh karena itu, LPMK dapat menjadi tempat penampung aspirasi serta keluhan dari masyarakat untuk diselesaikan, dan selanjutnya meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak Pemerintah Kelurahan untuk ditindaklanjuti.

Salah satu dari empat kelurahan di Kecamatan Pontianak Tenggara yang membentuk LPMK di kelurahannya adalah Kelurahan Bangka Belitung Laut. Dibentuknya LPMK di kelurahan ini telah berjalan sejak

tahun 2009. Kehadiran LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut menjadi mitra bagi pemerintahan di kelurahan, terutama yang berada di jajaran pemerintahan Kota Pontianak. Adapun di dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 bahwa anggota LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut ini memiliki fungsi sebagai berikut mengakomodasi dan/atau memfasilitasi aspirasi, mengakomodasi dan/atau memfasilitasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian sumber daya pembangunan terutama yang dilaksanakan dan melibatkan swadaya masyarakat.

Namun kenyataan yang terjadi, ketika peneliti melakukan Pra survey di lapangan, terdapat fenomena yang terlihat dari LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut, fenomena permasalahan yang ditemui oleh peneliti yang menjadi penyebab tidak berjalan secara optimal LPMK yaitu kesibukan pengurus sebab mereka juga mempunyai pekerjaan pokok selain menjadi anggota LPMK. Ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), wirausaha dan lain sebagainya. Faktor penyebab lainnya yaitu tidak adanya gaji bagi pengurus LPMK. Jadi pengurus dari LPMK melaksanakan tugas mereka berdasarkan pada jiwa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan di Kelurahan Bangka Belitung Laut.

Kemudian sebagai mitra dari LPMK, Pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Laut memberikan fasilitas kepada LPMK. Fasilitas yang diberikan berupa ruangan yang nantinya digunakan oleh LPMK melakukan berbagai kegiatan serta pertemuan yang erat kaitannya dengan masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut dalam menyampaikan aspirasi

mereka. Ruangan yang disediakan tersebut tampak seperti tidak pernah digunakan oleh LPMK, hal ini terlihat dari tidak adanya seorang pun kepengurusan dari LPMK yang melakukan aktifitas di ruangan tersebut. Sehingga mengindikasikan bahwa LPMK telah lama tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut.

Selain itu, fenomena yang dilihat oleh peneliti yaitu tidak adanya struktur organisasi kepengurusan dari LPMK di ruangan ketika peneliti melakukan observasi di ruangan tersebut. Peneliti juga melihat minimnya dokumen-dokumen atau pun arsip yang tersusun di ruangan LPMK. Fenomena yang terlihat lainnya yaitu ketidaksesuaian LPMK dalam melaksanakan tugasnya, tampak dari keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB.

## 2. Rumusan Permasalahan

Melihat dari latar belakang serta fokus penelitian, maka dari itu rumusan permasalahannya adalah bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak?

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

## 4. Manfaat Penelitian

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan, pada kajian kinerja Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Sehingga bisa menjadi perbandingan terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada permasalahan yang serupa.

## B. TEORI DAN METODELOGI

### 1. Kajian Pustaka

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung Wibowo (2007 : 7). Sehubungan dengan pernyataan tersebut dijelaskan juga oleh, Sudarto (1999 : 2) bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu orang yang dilakukan oleh individu, yang dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur. Dari pendapat para ahli, maka dapat dikatakan bahwa kinerja adalah proses dari suatu kegiatan berlangsung, yang dilakukan oleh individu kemudian hasil kerja tersebut diukur berdasarkan hasil kerjanya. Pengertian kinerja menurut ahli memiliki pengertian sebagai berikut, Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabannya dengan hasil seperti yang diharapkan Joko Widodo (2005 : 78). Selanjutnya menurut Prawirosentono (dalam Widodo 2005 : 78) kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal,

tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. kinerja organisasi merupakan tingkatan sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan yang berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Karena misi dibentuknya suatu organisasi adalah ingin tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan ketika organisasi terbentuk. Sehingga dengan adanya kinerja organisasi dapat digunakan untuk melihat hasil atau mengevaluasi organisasi, apakah dalam proses kerjanya telah sejalan dan dilaksanakan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

Kinerja Organisasi yang baik merupakan harapan bagi setiap organisasi. Sehingga untuk mengetahui baik atau tidaknya organisasi tersebut, maka diperlukannya indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasi. Menurut Moeheriono (2012 : 162) yaitu, ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

- a. Responsivitas (*Responsiveness*), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Responsibilitas (*Responsibility*), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.
- c. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian

dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan *verification*. Lokasi penelitian ialah Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Subjek Penelitian ialah Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi pemberdayaan, Ketua LPMK, Sekretaris LPMK, Pengurus LPMK < RW, RT dan masyarakat yang dipilih dengan teknik purposive.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Responsivitas

Mengkaji mengenai responsivitas, berarti melihat kemampuan dari LPMK yang ada di Kelurahan Bangka Belitung Laut dalam menanggapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di kelurahan. Kepekaan dari LPMK terhadap kebutuhan masyarakat menjadi indikator responsive tidaknya LPMK tersebut. LPMK sebagai mitra dari pemerintah kelurahan harusnya mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut yang tertampung di LPMK dapat disampaikan ke pemerintah. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa LPMK yang bekerja bersama pemerintah kelurahan bekerja dengan optimal.

Oleh karena itu, bagaimana ketanggapan dari LPMK dalam menghadapi keluhan yang datang dari masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut sangat

diperlukan. Karena sikap tanggap yang diberikan oleh LPMK ini merupakan sikap dasar yang harus diberikan agar lebih mengetahui apa yang menjadi harapan dari masyarakat di kelurahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan Responsivitas dari LPMK dalam melaksanakan tugasnya mengalami kemunduran. LPMK dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan seperti Musrenbang kurang aktif. Langkah yang diambil dalam mengatasi keluhan dinilai kurang tepat. Sehingga masyarakat tidak merasakan dampak yang timbul dari hasil Musrenbang. Selain itu, dalam menyampaikan aspirasi, LPMK terkesan pasif yang menunjukkan bahwa Responsivitas LPMK tidak sepenuhnya dalam menangani kebutuhan masyarakat.

### 2. Responsibilitas

Diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yang menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, harus adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Responsibilitas adalah segala pelaksanaan kegiatan oleh lembaga yang dilakukan berdasarkan pada prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan lembaga, baik yang secara eksplisit maupun implisit. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan tidak adanya penyimpangan dari kebijakan lembaga yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi salah satu dasar bagi LPMK dalam menjalankan program-program yang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Responsibilitas yang ditunjukkan oleh LPMK terlihat masih kurang baik. Hal ini dapat terlihat pada peran anggota LPMK yang masih kurang sesuai dengan Peraturan daerah kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai contoh keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB yang seharusnya bukan merupakan wewenang dari LPMK, melainkan wewenang dari kelurahan.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara dapat diamati berdasarkan pelaksanaan fungsinya, yaitu mengakomodasi dan/atau memfasilitasi aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, serta melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya pembangunan terutama yang dilaksanakan dan yang melibatkan swadaya masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan erat kaitannya dengan kemampuan LPMK dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut LPMK mengutamakan bentuk kegiatan dan kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh LPMK Kelurahan Bangka Belitung Laut tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Akuntabilitas LPMK Kelurahan Bangka Belitung Laut dapat diamati berdasarkan keseriusan dari kepengurusan LPMK dalam menjalankan program-program yang ada di

pemerintahan kelurahan yang berhubungan dengan bidang-bidang yang telah ada, seperti kebersihan, keamanan, ketertiban, pembinaan kepada masyarakat. Berdasarkan pada akuntabilitas yang diteliti di lapangan terlihat bahwa Akuntabilitas dari LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut belum optimal. Tampak dari perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan di tingkat kelurahan masih minim, LPMK kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK terhadap kelurahan.

### D. Simpulan

#### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Responsivitas dari LPMK dalam melaksanakan tugasnya mengalami kemunduran. LPMK dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan seperti Musrenbang kurang aktif. Langkah yang diambil dalam mengatasi keluhan dinilai kurang tepat. Sehingga masyarakat tidak merasakan dampak yang timbul dari hasil Musrenbang. Selain itu, dalam menyampaikan aspirasi, LPMK terkesan pasif yang menunjukkan bahwa Responsivitas LPMK tidak sepenuhnya dalam menangani kebutuhan masyarakat.
2. Responsibilitas yang ditunjukkan oleh LPMK terlihat masih kurang baik. Hal ini dapat terlihat pada peran anggota LPMK yang masih kurang sesuai dengan Peraturan daerah kota Pontianak Nomor

24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai contoh keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB yang seharusnya bukan merupakan wewenang dari LPMK, melainkan wewenang dari kelurahan.

3. Akuntabilitas dari LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut belum optimal. Tampak dari perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan di tingkat kelurahan masih minim, LPMK kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK terhadap kelurahan.

#### E. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah kelurahan yang merupakan mitra dari LPMK bisa memberikan reward atau pun penghargaan kepada LPMK terhadap apa yang telah dilakukannya, seperti memberikan honor kepada pengurus LPMK yang berada di kelurahan.
2. Diharapkan Pemerintah Kelurahan dapat memberikan dan membagi tugas-tugas kepada LPMK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ketidaksesuaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Masing-masing kepengurusan LPMK menanamkan sikap tanggung jawab. Sehingga setiap pengurus yang sudah ada dan terbentuk bertanggung jawab

terhadap tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008.

James, A.F. & Mona, 1994. *Service Management for Competitive Advantage*. Singapore : Mc Graw Hill inc.

Keban, Jeremias, T. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Makalah, seminar sehari, FISIPOL, UGM : Yogyakarta.

LAN dan BPKP, Modul I. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akutansi Sektor Publik : Suatu Sasaran Good Governance*. Jurnal Akutansi Pemerintah vol 2.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Moehiono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi, Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R Dan D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Tohardi, Ahmad.2010. *Diklat Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Tangkilisan, Hassel Nogi. 2005. *Manajemen Piblik*. Jakarta : PT. Grasindo, anggota IKAPI.

Umam Khaerul. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Widodo, Joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Bayu Media3.

Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

#### **Peraturan dan Undang-undang**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Tulisan-tulisan (Jurnal, skripsi, dan tesis)**

Pamungkas, Yohanes Setyo Agung. 2009. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Melaksanakan Pembangunan Dengan Menggunakan Dana PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Malang.

Hadiansyah, Nurul. 2013. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : [jurnal.mhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnal.mhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NABILA NURUL ANNISYA  
NIM / Periode lulus : E42010035 / 2014  
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / IIP : [nabilanurulannisya@gmail.com](mailto:nabilanurulannisya@gmail.com) / 081345233411

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA  
KOTA PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui 23/1/2015  
Pengelola Jurnal Prodi IP  
H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 3 November 2014  
(NABILA NURUL ANNISYA)